

KEBIJAKAN PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA GORONTALO

Sri Rahayu M. Hasan^{1)*}, Asna Aneta²⁾, Juriko Abdussamad³⁾

¹ Prodi. Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo
hsnay061@gmail.com

² Prodi. Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo

³ Prodi. Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK

Parkir adalah komponen penting dari sistem transportasi karena merupakan titik awal dan akhir dari setiap perjalanan kendaraan. Artinya, fasilitas parkir sangat penting untuk efisiensi keseluruhan sistem transportasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tahapan-tahapan berikut dalam proses implementasi Kebijakan Digitalisasi Pelayanan Publik di Desa Limba U1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo: 1) Penyusunan Agenda, 2) Perumusan Kebijakan, 3) Pengadopsian Kebijakan, 4) Implementasi Kebijakan, dan 5) Evaluasi Kebijakan. Penelitian ini berfokus pada hal-hal tersebut di atas. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Gorontalo mengalami kelemahan di seluruh tahapan prosesnya: pada penyusunan agenda belum berbasis data empiris dan partisipasi pemangku kepentingan, sehingga permasalahan belum terpetakan secara sistematis; pada perumusan kebijakan masih bersifat konvensional, belum mengadopsi teknologi digital, serta kurang melibatkan pelaksana lapangan; pada tahap adopsi lebih menekankan aspek hukum formal tanpa mempertimbangkan kesiapan sumber daya dan sosialisasi yang memadai; pada implementasi terjadi kebocoran retribusi, lemah pengawasan, serta rendahnya kepatuhan yang menyebabkan penerimaan tidak mencapai target; sedangkan pada evaluasi hanya bersifat administratif, tidak sistematis, dan tidak memiliki mekanisme umpan balik yang jelas. Akibatnya, kebijakan belum berjalan efektif, kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah belum optimal, serta kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat masih kurang memuaskan.

Kata kunci: Kebijakan, Parkir, Pendapatan

ABSTRACT

Parking is a crucial component of the transportation system as it is the starting and ending point of every vehicle journey. This means that parking facilities are crucial for the overall efficiency of the transportation system. The purpose of this study is to examine the following stages in the implementation process of the Public Service Digitalization Policy in Limba U1 Village, South Kota District, Gorontalo City: 1) Agenda Preparation, 2) Policy Formulation, 3) Policy Adoption, 4) Policy Implementation, and 5) Policy Evaluation. This study focuses on the aforementioned. The method used in this study is qualitative. The results show that the public roadside parking service policy in Gorontalo City experiences weaknesses in all stages of the process: the agenda preparation is not based on empirical data and stakeholder participation, so that problems have not been systematically mapped; the policy formulation is still conventional, has not adopted digital technology, and does not involve field implementers; the adoption stage emphasizes formal legal aspects without considering resource readiness and adequate socialization; during implementation there are levy leaks, weak supervision, and low compliance resulting in revenue not reaching the target; Meanwhile, evaluations are purely administrative, unsystematic, and lack clear feedback mechanisms. As a result, policies have not been implemented effectively, their contribution to Regional Original Income has not been optimal, and the quality of service perceived by the public remains unsatisfactory.

Keywords: Policy, Parking, Revenue

Submisi: 02-05-2026
Diterima: 03-05-2026
Dipublikasikan: 05-05-2026

PENDAHULUAN

Peraturan Daerah atau (PERDA) sebagai suatu alat untuk strategi pengelolaan parkir Kota Gorontalo yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo. Tujuan dari strategi ini adalah untuk meningkatkan arus lalu lintas, memperluas pilihan parkir umum, dan meningkatkan LGR (PAD). (Studi yang dilakukan oleh Pattipeilohy dan rekan-rekannya pada tahun 2024?). Pemerintah Kota Gorontalo telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan dana pemerintah daerah melalui pengumpulan pungutan daerah. Salah satu kebijakan tersebut adalah kebijakan yang mengatur layanan parkir di tepi jalan di kota, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 15 Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2020.

Peraturan Daerah di Indonesia yang dibentuk oleh Kepala Daerah Propinsi maupun Kota dengan DPRD dalam wilayah yang setara telah diatur sedemikian rupa sehingga Upaya harmonisasi dan sinronisasi yang menyeluruh dari segala aspeknya harus dijalankan secara berkelanjutan.(Irawan et al., 2024)

Istilah kebijakan secara epistemologi berasal dari Bahasa Inggris “*policy*”. Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan diartikan sama dengan keputusan. Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling terkait. Kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.(Fauzan, 2024)

Parkir tepi jalan umum atau *on-street parking* adalah fasilitas parkir yang menggunakan badan jalan sebagai tempat berhentinya kendaraan. parkir tepi jalan umum adalah penggunaan sebagian badan jalan untuk tempat parkir kendaraan dengan tetap memperhatikan kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan parkir di tepi jalan harus dilakukan secara terencana agar tidak mengganggu fungsi utama jalan sebagai sarana pergerakan.(Anggara et al., 2022)

Administrasi publik merujuk pada serangkaian kegiatan dan proses yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mengelola sumber daya, menyusun kebijakan, serta menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Administrasi publik melibatkan berbagai fungsi, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Tujuannya adalah untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, (Utami, 2023).

Menurut (Gurusi et al., 2025), Para akademisi telah menunjukkan bahwa peraturan parkir di tepi jalan tersebut dapat mendatangkan uang bagi masyarakat. Dengan demikian, parkir di tepi jalan dan kebijakan biaya layanan transportasi berpotensi menghasilkan pendapatan lokal yang substansial yang dapat digunakan untuk pertumbuhan dan administrasi Kota Gorontalo. Meskipun demikian, beberapa ahli dalam bidang implementasi kebijakan publik berpendapat bahwa efektivitas suatu kebijakan pada akhirnya bergantung pada pelaksanaannya, terlepas dari berapa lama kebijakan tersebut telah ada.

Fasilitas parkir yang memadai dan sesuai, antara lain, akan meningkatkan rencana Kota Gorontalo dan menempatkan orang yang tepat untuk mengelola garasi parkir ini. Meskipun demikian, layanan parkir Kota Gorontalo belum memenuhi harapan dalam hal

kualitas layanan, fasilitas, atau penghasilan. Akibatnya, Pemerintah Kota Gorontalo harus mengambil langkah lebih lanjut. Pengalaman masyarakat sebagai pelanggan layanan parkir akan ditingkatkan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan dimaksimalkan. (Taha, 2022).

Pelayanan publik yang bermutu atau yang biasa disebut pelayanan prima adalah pelayanan terbaik yang memenuhi standar mutu pelayanan. Standar pelayanan merupakan tolak ukur yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan, seperti komitmen pemberi pelayanan dan janji kepada masyarakat mengenai pelayanan yang bermutu, cepat, sederhana, terjangkau dan terukur. Sesuai Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pemberian pelayanan meliputi persyaratan, prosedur, jangka waktu layanan, biaya/tarif, produk layanan dan penanganan keluhan. (Hidayatullah, 2024)

Kota Gorontalo, layanan parkir umum di pinggir jalan memiliki potensi besar untuk menghasilkan PPN. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti meningkatnya jumlah mobil di jalan dan meningkatnya keterlibatan masyarakat di area komersial. Namun dalam praktiknya, kontribusi denda parkir terhadap pendapatan daerah (PPN) belum begitu menguntungkan. Artinya, pemerintah daerah tidak menghasilkan uang sebanyak yang seharusnya, (Taha, 2022).

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar pendanaan regional adalah pendapatan asli regional, atau PAD. Akibatnya, kontribusi PAD terhadap Anggaran Daerah (APBD) merupakan ukuran kapasitas implementasi ekonomi. Semakin sedikit ketergantungan administrasi regional pada pemerintah federal, semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD. (Nurjaya & Mulayani, 2025)

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut di atas, maka memotivasi calon peneliti untuk mengkaji lebih lanjut dengan Judul “Kebijakan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo”. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tahapan-tahapan berikut dalam proses implementasi Kebijakan Digitalisasi Pelayanan Publik di Desa Limba U1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo: 1) Penyusunan Agenda, 2) Perumusan Kebijakan, 3) Pengadopsian Kebijakan, 4) Implementasi Kebijakan, dan 5) Evaluasi Kebijakan. Penelitian ini berfokus pada hal-hal tersebut di atas.

METODE

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Gorontalo. Adapun waktu pelaksanaan penelitian akan dilakukan selama tiga bulan.

Sumber data dalam penelitian ini, terdiri atas data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data, meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk melakukan analisis Penulis menggunakan analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles,

Huberman, dan Saldana, (2014) terdiri atas 4 langkah, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Penyusunan Agenda

Hasil penelitian pada tahap penyusunan agenda dalam kebijakan pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Gorontalo menunjukkan adanya kelemahan mendasar yang bersifat struktural, terutama dalam aspek identifikasi masalah dan penentuan prioritas kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa berbagai permasalahan seperti parkir liar, kebocoran retribusi, serta ketidakteraturan sistem parkir belum terpetakan secara komprehensif. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses agenda setting belum dilakukan secara sistematis dan belum berbasis data empiris yang kuat. Secara teoritis, William N. Dunn menegaskan bahwa tahap agenda setting harus diawali dengan proses problem structuring, yaitu kegiatan analitis untuk mendefinisikan masalah secara jelas, terukur, dan berbasis data. Namun, dalam konteks penelitian ini, proses tersebut belum berjalan optimal, sehingga masalah parkir belum sepenuhnya diposisikan sebagai isu strategis dalam kebijakan daerah.

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa kelemahan pada tahap agenda setting menjadi akar permasalahan kebijakan pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Gorontalo. Kegagalan dalam mengidentifikasi dan memetakan masalah secara komprehensif tidak hanya berdampak pada kualitas formulasi kebijakan, tetapi juga mempengaruhi seluruh tahapan kebijakan berikutnya. Temuan ini sekaligus memodifikasi teori Dunn, dimana dalam praktiknya problem structuring tidak hanya membutuhkan data, tetapi juga memerlukan integrasi antara data, partisipasi stakeholder, serta orientasi kebijakan terhadap penciptaan nilai publik, khususnya dalam peningkatan PAD.

Hasil wawancara dengan informan dari Dinas Perhubungan Kota Gorontalo, terungkap bahwa hingga saat ini belum terdapat sistem pendataan yang terintegrasi terkait titik parkir, jumlah juru parkir aktif, serta potensi riil penerimaan retribusi di setiap lokasi. Salah satu informan menyatakan bahwa “pendataan parkir masih bersifat manual dan belum diperbarui secara berkala, sehingga sulit mengetahui potensi sebenarnya dari sektor parkir.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa keterbatasan data tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga terjadi pada level operasional. Dalam perspektif teori kebijakan publik, kondisi ini mengindikasikan lemahnya *evidence-based policy*, dimana kebijakan tidak didukung oleh data yang valid dan reliabel. Padahal, penggunaan data yang akurat sebagai rasyarat utama dalam menentukan agenda kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.

Hasil wawancara dengan juru parkir di lapangan juga menunjukkan bahwa banyak titik parkir yang tidak terdata secara resmi, sehingga berpotensi menimbulkan parkir liar dan kebocoran retribusi. Beberapa juru parkir mengakui bahwa terdapat praktik setoran yang tidak sesuai dengan ketentuan karena lemahnya pengawasan serta tidak adanya sistem pencatatan yang transparan. Temuan ini memperkuat bahwa permasalahan parkir tidak hanya terletak pada aspek kebijakan formal, tetapi juga pada realitas implementasi di lapangan yang tidak terjangkau dalam proses penyusunan agenda. Dalam teori implementasi kebijakan, kondisi ini menunjukkan adanya disconnect antara policy

environment dan street-level reality, dimana pengalaman pelaksana lapangan tidak terakomodasi dalam proses perumusan kebijakan.

Hasil wawancara dari sisi masyarakat pengguna layanan menunjukkan bahwa adanya keluhan terkait ketidakteraturan parkir, tarif yang tidak seragam, serta tidak adanya kepastian pelayanan. Masyarakat menilai bahwa pelayanan parkir masih belum memberikan rasa aman dan kenyamanan. Dalam perspektif teori kualitas pelayanan publik, kondisi ini menunjukkan adanya gap antara *expected service* dan *perceived service*, yang berakar dari lemahnya tahap awal kebijakan dalam memahami kebutuhan pengguna. Dengan kata lain, kegagalan pada tahap agenda setting tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga secara langsung mempengaruhi kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat.

Berdasarkan hasil temuan empiris melalui wawancara ini semakin memperkuat bahwa permasalahan utama dalam kebijakan pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Gorontalo terletak pada lemahnya fondasi awal kebijakan, yaitu tahap penyusunan agenda. Tidak hanya kurangnya data, tetapi juga minimnya integrasi informasi, rendahnya partisipasi aktor lapangan, serta tidak optimalnya pemanfaatan pengalaman empiris sebagai dasar kebijakan. Hal ini berdampak langsung pada tidak optimalnya kontribusi sektor parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta rendahnya kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Hasil penelitian pada tahap formulasi kebijakan pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Gorontalo menunjukkan bahwa kebijakan yang dirumuskan masih bersifat konvensional dan belum berbasis pada pendekatan inovatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya mengadopsi sistem digital, belum berbasis data empiris, serta belum mampu menjawab kompleksitas permasalahan di lapangan. Menurut Thomas R. Dye, kualitas kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas informasi yang digunakan dalam proses perumusannya. Namun, dalam penelitian ini ditemukan bahwa kebijakan masih disusun berdasarkan pendekatan administratif, bukan berdasarkan analisis data yang komprehensif. Hal ini menunjukkan adanya *evidence gap* dalam proses formulasi kebijakan.

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa kelemahan pada tahap formulasi kebijakan tidak hanya terletak pada kurangnya inovasi, tetapi juga pada tidak adanya integrasi antara data, teknologi, dan kondisi lapangan. Temuan ini sekaligus memperluas teori Dye, dimana kualitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh informasi yang digunakan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan informasi tersebut ke dalam desain kebijakan yang kontekstual dan adaptif. Selain itu, temuan ini juga menunjukkan bahwa formulasi kebijakan parkir di Kota Gorontalo belum sepenuhnya mampu berfungsi sebagai instrumen strategis dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga memerlukan perbaikan mendasar pada aspek desain kebijakan yang lebih berbasis data, inovatif, dan terintegrasi.

Hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Gorontalo, diketahui bahwa proses formulasi kebijakan pelayanan parkir masih didominasi oleh pendekatan administratif dan belum sepenuhnya berbasis kajian akademik maupun analisis potensi riil

di lapangan. Salah satu informan menyatakan bahwa “kebijakan yang ada saat ini lebih banyak melanjutkan aturan sebelumnya, belum ada inovasi baru seperti sistem parkir digital atau e-retribusi.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang dihasilkan masih terbatas dan belum mengarah pada solusi inovatif. Dalam perspektif teori kebijakan publik, Dunn menegaskan bahwa tahap formulasi seharusnya menghasilkan berbagai alternatif kebijakan (*policy alternatives*) yang rasional dan berbasis analisis komprehensif. Namun, dalam konteks ini, proses formulasi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tersebut.

Hasil wawancara dengan aparat pelaksana di lapangan menunjukkan bahwa tidak adanya keterlibatan teknis dalam proses perumusan kebijakan menyebabkan kebijakan yang dihasilkan kurang aplikatif. Beberapa informan menyampaikan bahwa mereka tidak dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan, sehingga banyak ketentuan yang sulit diterapkan di lapangan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perumus kebijakan (*policy maker*) dengan pelaksana kebijakan (*implementor*). Fenomena ini dapat dikategorikan sebagai *lack of policy coherence*, dimana kebijakan yang dirumuskan tidak selaras dengan kondisi operasional di lapangan.

Hasil wawancara dari sisi masyarakat pengguna layanan menunjukkan bahwa kebijakan parkir yang ada belum mampu memberikan kepastian pelayanan, terutama terkait standar tarif dan sistem pengelolaan parkir. Masyarakat menilai bahwa tidak adanya inovasi dalam sistem parkir menyebabkan pelayanan tetap bersifat konvensional dan kurang transparan. Dalam perspektif New Public Management (NPM), kebijakan publik seharusnya mengadopsi prinsip efisiensi, efektivitas, dan inovasi melalui pemanfaatan teknologi. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip tersebut belum terimplementasi dalam formulasi kebijakan parkir di Kota Gorontalo.

Tahap formulasi kebijakan pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Gorontalo masih menghadapi berbagai kelemahan, terutama dalam hal kurangnya inovasi, minimnya keterlibatan stakeholder, serta belum optimalnya penggunaan pendekatan berbasis data dan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dirumuskan belum sepenuhnya memenuhi prinsip rasionalitas kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Dunn, serta belum mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang modern dan akuntabel.

Berdasarkan hasil temuan, dapat disimpulkan bahwa tahap formulasi kebijakan pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Gorontalo masih menghadapi berbagai kelemahan, terutama dalam hal kurangnya inovasi, minimnya keterlibatan stakeholder, serta belum optimalnya penggunaan pendekatan berbasis data dan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dirumuskan belum sepenuhnya memenuhi prinsip rasionalitas kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Dunn, serta belum mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang modern dan akuntabel.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Hasil penelitian pada tahap adopsi kebijakan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan parkir telah memiliki legitimasi formal melalui Peraturan Daerah, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya mampu berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang operasional. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara legalitas kebijakan dengan implementasinya di lapangan. Tahap adopsi kebijakan merupakan proses pemilihan

alternatif kebijakan yang didasarkan pada pertimbangan politik dan administratif. Namun, dalam penelitian ini ditemukan bahwa proses adopsi belum sepenuhnya mempertimbangkan kesiapan sumber daya dan kondisi lapangan, sehingga kebijakan yang diadopsi cenderung bersifat formalistik dan belum kontekstual.

Hasil temuan, menunjukkan bahwa kelemahan pada tahap adopsi kebijakan tidak hanya terletak pada aspek legalitas, tetapi juga pada kurangnya integrasi antara kebijakan dengan kesiapan sumber daya, komunikasi kebijakan, serta penerimaan sosial di masyarakat. Temuan ini sekaligus memperluas teori Anderson, dimana keberhasilan adopsi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh pertimbangan politik dan administratif, tetapi juga oleh kesiapan implementasi dan legitimasi sosial. Selain itu, temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan parkir di Kota Gorontalo belum sepenuhnya mampu berfungsi sebagai instrumen kebijakan publik yang efektif dalam mengelola sektor parkir sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga memerlukan penguatan pada aspek komunikasi, partisipasi, dan kesiapan sistem dalam proses adopsinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Gorontalo, diketahui bahwa dalam proses adopsi kebijakan, pertimbangan terhadap kesiapan sumber daya manusia dan sarana pendukung belum dilakukan secara optimal. Salah satu informan menyatakan bahwa “kebijakan sudah ditetapkan, tetapi di lapangan masih banyak keterbatasan, baik dari jumlah petugas maupun sistem yang digunakan.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa proses adopsi kebijakan lebih menitikberatkan pada aspek legalitas formal dibandingkan kesiapan implementasi. Dalam perspektif teori kebijakan publik. Pada tahap adopsi kebijakan seharusnya mempertimbangkan kelayakan implementasi (feasibility), termasuk kesiapan sumber daya, dukungan kelembagaan, dan kondisi sosial masyarakat. Namun, dalam konteks penelitian ini, aspek tersebut belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama.

Hasil wawancara dengan pelaksana di lapangan menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan kepada juru parkir dan masyarakat masih sangat terbatas. Beberapa informan menyatakan bahwa mereka hanya mengetahui kebijakan secara umum tanpa memahami secara detail aturan dan mekanisme yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam proses komunikasi kebijakan. Implementasi kebijakan, Edward III menekankan bahwa komunikasi yang jelas dan konsisten merupakan faktor utama keberhasilan kebijakan. Ketika kebijakan tidak disosialisasikan dengan baik, maka akan terjadi distorsi informasi yang berdampak pada ketidaksesuaian pelaksanaan di lapangan.

Hasil wawancara dari sisi masyarakat, menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna jasa parkir tidak mengetahui secara pasti dasar hukum tarif parkir maupun mekanisme pengelolaannya. Hal ini menimbulkan persepsi negatif terhadap kebijakan parkir karena dianggap tidak transparan. Dalam perspektif good governance, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam pelaksanaan kebijakan publik. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam tahap adopsi kebijakan parkir di Kota Gorontalo.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tahap adopsi kebijakan pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Gorontalo masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal kurangnya pertimbangan terhadap kesiapan implementasi, lemahnya sosialisasi kebijakan, serta belum optimalnya penerapan prinsip transparansi. Kondisi ini

menunjukkan bahwa kebijakan yang diadopsi belum sepenuhnya memenuhi prinsip feasibility dalam kebijakan publik, sehingga berdampak pada lemahnya implementasi di tahap berikutnya.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Hasil penelitian pada tahap implementasi merupakan tahap paling krusial dalam kebijakan pelayanan parkir di Kota Gorontalo, karena pada tahap ini kebijakan diuji secara nyata dalam praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kebocoran retribusi, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kepatuhan pelaksana. Menurut Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini, keempat faktor tersebut belum berjalan secara optimal, sehingga kebijakan belum mampu berfungsi sebagai sistem pengelolaan parkir yang efektif dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil temuan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan parkir di Kota Gorontalo belum mampu berjalan secara optimal karena masih menghadapi berbagai kendala struktural, seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan pelaksana, serta tidak efektifnya penegakan kebijakan. Temuan ini sekaligus memperkuat teori Edward III, bahwa keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh integrasi antara komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun, dalam konteks penelitian ini, keempat faktor tersebut belum terintegrasi secara optimal, sehingga kebijakan belum mampu menciptakan sistem pengelolaan parkir yang tertib, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Gorontalo, diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan parkir tepi jalan umum masih menghadapi berbagai kendala teknis dan struktural. Salah satu informan menyatakan bahwa “pengawasan di lapangan masih terbatas, sehingga sulit memastikan semua juru parkir menyetor sesuai ketentuan.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum didukung oleh sistem pengawasan yang efektif. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan, menurut Edward III bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kelemahan layanan paling dominan terletak pada aspek pengawasan (kontrol birokrasi) dan keterbatasan sumber daya, sehingga kebijakan tidak berjalan secara optimal.

Hasil wawancara dengan juru parkir di lapangan menunjukkan adanya praktik penyetoran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa informan mengakui bahwa setoran yang diberikan seringkali tidak sesuai dengan jumlah kendaraan yang dilayani, yang disebabkan oleh tidak adanya sistem pencatatan yang transparan dan lemahnya pengawasan dari instansi terkait. Kondisi ini menunjukkan adanya penyimpangan dalam implementasi kebijakan yang berpotensi menimbulkan kebocoran retribusi. Dalam teori street-level bureaucracy, pelaksana di lapangan memiliki diskresi yang besar dalam menjalankan kebijakan, sehingga tanpa pengawasan yang kuat, kebijakan rentan mengalami distorsi dalam pelaksanaannya.

Hasil wawancara dari pihak masyarakat, menunjukkan bahwa pengguna jasa parkir seringkali tidak mendapatkan karcis resmi serta menghadapi ketidakpastian tarif di

beberapa lokasi. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa pengelolaan parkir belum transparan dan belum profesional. Dalam perspektif kualitas pelayanan publik, kondisi ini menunjukkan adanya gap antara standar pelayanan yang seharusnya dengan pelayanan yang diterima masyarakat. Kondisi ini sebagai service delivery gap, yaitu kesenjangan dalam proses penyampaian layanan akibat lemahnya sistem operasional dan pengawasan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tahap implementasi kebijakan pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Gorontalo merupakan titik kritis yang menentukan keberhasilan kebijakan secara keseluruhan. Kelemahan dalam aspek sumber daya, pengawasan, dan sistem pengelolaan menunjukkan bahwa kebijakan belum diimplementasikan sesuai dengan prinsip efektivitas dan akuntabilitas. Hal ini menegaskan bahwa tanpa perbaikan pada tahap implementasi, kebijakan yang telah dirumuskan dan diadopsi tidak akan mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan PAD.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Hasil penelitian pada tahap evaluasi kebijakan pelayanan parkir di Kota Gorontalo menunjukkan bahwa evaluasi belum dilakukan secara sistematis dan berbasis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi masih bersifat administratif dan belum mampu mengukur kinerja kebijakan secara menyeluruh. Evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui indikator yang jelas dan terukur. Namun, dalam penelitian ini, belum terdapat indikator yang spesifik dalam mengukur keberhasilan kebijakan parkir, khususnya dalam kaitannya dengan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi ini menunjukkan adanya evaluation gap, dimana kebijakan tidak memiliki sistem evaluasi yang memadai sebagai dasar pengambilan keputusan.

Hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Gorontalo, diketahui bahwa proses evaluasi kebijakan pelayanan parkir tepi jalan umum belum dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Salah satu informan menyatakan bahwa “evaluasi biasanya hanya dilakukan secara internal dan belum berbasis data yang lengkap, sehingga sulit mengukur keberhasilan kebijakan secara menyeluruh.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan masih bersifat administratif dan belum menjadi instrumen strategis dalam perbaikan kebijakan. Dalam perspektif teori kebijakan publik, Dunn menegaskan bahwa evaluasi kebijakan seharusnya dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan indikator kinerja yang jelas untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan. Namun, dalam konteks penelitian ini, proses evaluasi belum sepenuhnya memenuhi prinsip tersebut.

Hasil wawancara dengan pelaksana di lapangan menunjukkan bahwa tidak terdapat mekanisme umpan balik (feedback mechanism) yang jelas dari hasil evaluasi kepada pelaksana kebijakan. Beberapa informan menyatakan bahwa mereka jarang mendapatkan arahan atau perbaikan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa evaluasi yang dilakukan belum mampu menghasilkan pembelajaran kebijakan (*policy learning*). Evaluasi yang efektif harus mampu memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas kebijakan. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa fungsi tersebut belum berjalan optimal.

Hasil wawancara dari sisi masyarakat, menunjukkan bahwa pengguna jasa parkir

belum merasakan adanya perubahan atau perbaikan pelayanan meskipun kebijakan telah berjalan dalam beberapa waktu. Masyarakat masih menghadapi permasalahan yang sama seperti ketidakteraturan parkir, ketidakpastian tarif, dan kurangnya transparansi. Hal ini menunjukkan bahwa hasil evaluasi kebijakan belum berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam perspektif good governance, evaluasi kebijakan seharusnya berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat. Namun, kondisi yang terjadi menunjukkan bahwa evaluasi belum mampu menjembatani antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tahap evaluasi kebijakan pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Gorontalo belum berjalan secara optimal dan belum mampu berfungsi sebagai instrumen perbaikan kebijakan. Kelemahan dalam aspek sistem evaluasi, mekanisme umpan balik, serta pemanfaatan data menunjukkan bahwa evaluasi belum dilaksanakan sesuai dengan prinsip efektivitas dan akuntabilitas. Hal ini menegaskan bahwa tanpa evaluasi yang komprehensif dan berbasis data, kebijakan publik akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan, terutama dalam meningkatkan PAD.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, pada tahapan kebijakan pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Gorontalo yaitu belum berjalan optimal dan belum mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara maksimal. Oleh karena itu, penyusunan agenda belum berbasis data dan partisipasi, perumusan masih konvensional tanpa inovasi teknologi, adopsi kurang mempertimbangkan kesiapan operasional, implementasi terhambat oleh kebocoran retribusi serta lemahnya pengawasan, dan evaluasi bersifat administratif tanpa umpan balik yang efektif, sehingga kelemahan sistemik terjadi di seluruh tahapan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, T. (2023). *Manajemen pelayanan publik: Teori dan praktik*. Semarang: Tahta Media
- Akbar, M., Fikri, R., Baharuddin, M., & Tjenreng, Z. (2025). Manajemen pelayanan publik. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, Vol. 5, No. 1, hal. 291-304. <https://doi.org/10.37481/pkmb.v5i1.1300>
- Anggara, H. D., Kismartini, K., & Dwimawanti, I. H. (2022). Analysis of the quality of parking services at public roads in Pekalongan City. *Perspektif*, Vol. 11, No.2, hal. 625-631. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6033>
- Anwar, Z., Rusli, Z., & Yuliani, F. (2023). Pelayanan retribusi parkir tepi jalan umum Kota Dumai. *Jurnal Niara*, vol. 15, No. 3, hal. 424-442. <https://doi.org/10.31849/niara.v15i3.12183>
- Fauzan, A. (2024). Model implementasi kebijakan publik. *Journal of Social Science Research*, 4, 17929-17938. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12674>
- Gurusi, L., Mansyah, M. S., & Supriyanto, S. (2025). Kebijakan hukum pengelolaan parkir

- dan peluang penerapan e-parkir: Solusi mendongkrak pendapatan daerah. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8, No. 1, hal. 254-269. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11452>
- Gusnima, D. (2025). Implementasi kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Pangkalpinang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 7, No. 1, hal. 50-69. <https://doi.org/10.33019/avwjsj82>
- Hidayatullah, G. M. (2024). Penerapan pelayanan prima pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Hulu Sungai Utara. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 3, No. 3, hal. 1219-1229. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2407>
- Irawan, A., Shofiyul, M., Mf, H., & Rahman, S. (2024). Peraturan daerah dalam hirarki perundang-undangan Indonesia. *Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, 3, 45-56.
- Ismaya, N., & Mustafa, L. O. (2022). Effectiveness of public services assessed with a systems theory approach in Public Work and Spatial Planning Offices of North Buton. *Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 13(1), 99-107.
- Kasiami, S. (2022). Implementasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 di Kabupaten Bojonegoro (studi kasus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara Universitas Bojonegoro*, 6(1), 33-39.
- Lathifaniya, P. T. (2023). Efektivitas dan strategi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum (studi kasus Kota Malang). *Palestin Tara Lathifaniya*, 2(1), 175-181.
- Nurjaya, M., & Mulayani, S. (2025). Pengaruh retribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Maros. *Jurnal Ekonomi & Manajemen*, 7, 172-179.
- Pattipeilohy, J. A., Tui, F. P., & Tantu, R. (2024). Efektivitas kebijakan pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Gorontalo. *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 4, 48-56. <https://doi.org/10.51178/jpspr.v4i3.2074>
- Purnama, Z., Dia, R., & Suri, M. (2024). Pelaksanaan pengawasan parkir di tepi jalan oleh UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (studi kasus Kecamatan Pekanbaru Kota). *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 481-497.
- Putra, P. A. M. (2022). Analisis kinerja aparat terhadap pelayanan publik di Desa Tridaya Sakti. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(8), 2968-2979.
- Putri, A. D., & Basyar, M. R. (2023). Implementasi Klampid New Generation dalam peningkatan pelayanan publik di Kelurahan Klampis Ngasem Kota Surabaya. 2(2), 694-701.
- Suprianto, B. (2023). Literature review: Penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 8(2), 123-128.
- Taha, M. (2022). Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Parkir. Gorontalo: JDIH Gorontalo.
- Utami, P. (2023). Transformasi administrasi publik: Inovasi dan adaptasi menuju efisiensi dan pelayanan publik berkualitas. *Jurnal Papatung*, 6(2), 1-9.

TENTANG PENULIS